

**ANALISIS RASIO KEMAMPUAN, KEMANDIRIAN DAN
PERTUMBUHAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Hariati Eka Putri

Pembimbing : Sri Endang Kornita dan Taryono

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : putri.hariatieka@yahoo.co.id

*analysis of ratio financial capacity, financial independence and
local financial growth in Pekanbaru*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the ratio of financial capacity, financial independence and financial growth of the Pekanbaru city years 2000-2014 as well as to view trends of financial capacity and financial independence of Pekanbaru years 2015-2020. This research is a quantitative descriptive study using analysis tools such as ratio and a polynomial trend. In the last fifteen years the average ratio of the financial capacity in Pekanbaru which is reflected in the ratio of Degree of Fiscal Autonomy (DOF) is still less, while the regional capability assessed in terms of expenditure as reflected in the Capability Index Routine relatively very less. While in terms of financial independence in Pekanbaru is still quite instructive, meaning that the central government's role is more dominant than the financial independence of Pekanbaru. When viewed from the ratio of growth is still likely to fluctuate with the average negative growth. Due to increased growth in the value of PAD, local revenue and expenditure is not routinely followed by construction spending growth. If the trend seen in 2015-2020 regional financial capability and financial independence of the region has a positive trend. That is projected in the coming six years the ratio of the degree of fiscal autonomy, the capability index ratio routine and financial independence ratio Pekanbaru is increasing every year.

Keywords : Financial Capability, Financial Independence and Local Revenue

PENDAHULUAN

Penerapan asas sentralisasi yang dulu di tetapkan di Indonesia menyebabkan semua kebijakan yang dibuat pemerintah pusat harus diikuti oleh pemerintah daerah. Keadaan tersebut menimbulkan rasa tidak puasan daerah terhadap pemerintah

pusat dimana daerah merasa dikekang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dianggap tidak adil terhadap daerah, kekayaan daerah dikuasai sementara pembangunan daerah kurang diperhatikan sehingga timbullah kecemburuan daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu daerah menuntut agar

diberi hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan kata lain mendorong terjadinya otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi pemerintahan dan keuangan (Savitry, 2013, 14).

Kota Pekanbaru adalah salah satu daerah yang sedang menjalankan otonomi daerah. Pemerintah kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basri (2007:2) mengatakan optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Pendapatan asli daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Tinggi nya PAD suatu daerah menyebabkan daerah tersebut mampu menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya tanpa bantuan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Dengan kata lain kemandirian daerah tersebut semakin meningkat.

Seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lain digambarkan dalam rasio pertumbuhannya. Rasio pertumbuhan ini dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari rasio pendapatan asli daerah, rasio total pendapatan daerah, rasio belanja rutin dan rasio

belanja pembangunan (Rahman,dkk 2014:64).

Untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan daerah yang tercermin dalam APBD dilakukan analisis rasio kemampuan, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan analisis *trend*. Analisis *trend* kemampuan dan kemandirian keuangan daerah perlu dilakukan. Karena bisa saja tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan Kota Pekanbaru belum menunjukkan persentasi yang baik, namun memiliki kecenderungan atau *trend* arah perkembangan yang positif.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain : 1) Bagaimana rasio kemampuan, kemandirian dan pertumbuhan keuangan Kota Pekanbaru tahun 2000-2014? 2) Bagaimana *trend* kemampuan dan kemandirian keuangan Kota Pekanbaru tahun 2015-2020?.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui rasio kemampuan, kemandirian dan pertumbuhan keuangan Kota Pekanbaru tahun 2000-2014. 2) Untuk mengetahui *trend* kemampuan dan kemandirian keuangan Kota Pekanbaru tahun 2015-2020.

TELAAH PUSTAKA

Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

1. Penerimaan Daerah

a) Penerimaan Pendapatan

Menurut Bratama dan Bambang yang dikutip dari tulisannya

Haryanto (2014:12) bahwa penerimaan pendapatan diartikan sebagai semua pendapatan kas daerah yang menambah equitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Mahmudi, 2010:16).
- 2) Dana Perimbangan, terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (Widjaja, 2011:129).
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya (Dama, 2014:16-18).

b) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali baik pada satu tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembayaran terdiri dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah (Dama, 2014:24-25).

2. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran pemerintah merupakan semua pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah digambarkan melalui belanja daerah dalam struktur APBD. Menurut UU No 33 Tahun 2004 belanja daerah didefinisikan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja langsung dapat diartikan sebagai belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program kegiatan yang direncanakan. Artinya suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa biaya tersebut. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan (Mahmudi, 2010: 97).

Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau unit kerja. Program atau kegiatan yang mendapatkan alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan Non Investasi. Dan anggaran belanja tidak langsung hanya digunakan untuk satu tahun anggaran (Mahmudi, 2010:97).

Analisis Keuangan Daerah

1. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut Dwiranda (2008:2) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Kemudian yang kedua, ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar PAD menjadi sebagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dan rasio indeks kemampuan rutin (IKR) (Sijabat, 2014: 238).

Derajat otonomi fiskal atau bisa juga disebut desentralisasi otonomi fiskal merupakan persentase PAD dibandingkan dengan penerimaan Total Pendapatan Daerah. Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Haryanto, 2014:22).

Sementara indeks kemampuan rutin (IKR) mengukur kemampuan keuangan daerah melalui perspektif pembiayaan daerah (Sijabat, 2014: 238). Indeks kemampuan rutin merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya. IKR digambarkan dengan persentase PAD dibandingkan dengan belanja rutin suatu daerah.

Dari rasio DOF dan IKR tersebut, kemudian diklasifikasikan

pola hubungan tingkat kemampuan keuangan daerah menjadi sangat kurang, kurang, cukup, sedang, baik dan sangat baik (Wulandari, 2001:22).

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sularso dan Restianto (2011:113) mendefinisikan rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin tinggi.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard mengenalkan “hubungan situasional” mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut (Dwiranda, 2008:7) :

- a. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih

- banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
 - d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan keuangan daerah merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari satu periode ke periode lainnya.

Analisis dalam menghitung rasio pertumbuhan keuangan ini dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari pendapatan asli daerah, total pendapatan daerah, belanja rutin, dan belanja pembangunan (Agustina, 2013:3). Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2008:241).

Hipotesis

Berdasarkan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- a. Diduga rasio kemampuan dan kemandirian keuangan daerah di kota Pekanbaru masih tergolong rendah dengan rasio pertumbuhan yang positif.
- b. Diduga kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru mengalami *trend* yang positif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya di Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengambilan data secara dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang ada dalam dokumentasi instansi yang diperoleh secara langsung dan studi kepustakaan dengan melakukan pengamatan dari literatur-literatur dan buku-buku yang mendukung. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data *time series* selama lima belas tahun yaitu dari tahun 2000-2014.

Metode Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan melakukan perhitungan terhadap rasio dan *trend*. Perhitungan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal, dan indeks kemampuan rutin, rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan keuangan daerah yang terdiri dari rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan TPD, rasio pertumbuhan belanja rutin dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan. Selanjutnya dilihat pula *trend* atau kecenderungan rasio keuangan daerah dengan menggunakan analisis

trend polynomial. Perhitungan *trend* ini dilakukan untuk mengestimasi rasio kemampuan, kemandirian dan pertumbuhan keuangan daerah dalam enam tahun yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dan rasio indeks kemampuan rutin (IKR) (Sijabat dkk, 2014:238).

Kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Selanjutnya dapat dilihat tolak ukur kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dalam skala interval DOF sebagai berikut:

Tabel 1
Skala interval Derajat Otonomi Fiskal

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber : Wulandari, 2001

Sedangkan melalui perspektif pengeluaran, kemampuan keuangan ditunjukkan berdasarkan rasio indeks

kemampuan rutin daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IKR = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100\%$$

Selanjutnya dilihat tolak ukur kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin daerahnya sebagai berikut:

Tabel 2
Skala interval Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 20,00	Sangat Kurang
20,01 – 40,00	Kurang
40,01 – 60,00	Cukup
60,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100	Sangat Baik

Sumber : Wulandari, 2001

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Selanjutnya dilihat tolak ukur kemandirian sebagai berikut:

Tabel 3
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
0-25	Instruktif
>25-50	Konsultatif
>50-75	Partisipatif
>75-100	Delegatif

Sumber : Paul Hersey dan Kenneth

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari pendapatan asli daerah, total pendapatan daerah, belanja rutin dan belanja pembangunan (Agustina, 2013:3). Secara umum rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : Data yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ : Data yang dihitung pada tahun ke-0

r : Pertumbuhan

4. Analisis Trend

Analisis *trend* merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang.

Alat untuk melihat kecenderungan atau *trend* Kemampuan dan Kemandirian keuangan Pekanbaru dimasa yang akan datang adalah dengan analisis *Trend Polynomial* dengan bantuan program komputer yaitu microsoft excel2010. *Trend* ini dipilih karena menghasilkan nilai koefisien determinasi (R²) yang paling besar jika dibandingkan dengan *trend* lainnya. Persamaan garis *trend* linier dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y' = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_6x^6$$

Keterangan

Y' = Perkembangan *trend* DOF, IKR dan KMD

a₀ = besarnya y saat x=0

a_{1,2,6} = besarnya y jika x mengalami perubahan 1 satuan

X = waktu

Definisi Operasional

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber potensial daerahnya dalam rangka meningkatkan PAD (Mahardika dan Artini, 2012:741).

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat diartikan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2008:232).

3. Pertumbuhan Keuangan Daerah

Pertumbuhan keuangan daerah menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lainnya (Agustina, 2013:3).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

1. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Pekanbaru ditinjau melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dan belanja daerah. Hasil kemampuan keuangan

pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2000-2014 yang ditinjau melalui pendekatan pendapatan diukur dengan rasio derajat otonomi fiskal (DOF). Hasil perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah Kota Pekanbaru tahun 2000-2014 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4
Perhitungan Rasio Derajat Otonomi Fiskal Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014

Tahun	DOF (Persen)	Keterangan
2000	15,15	Kurang
2001	12,28	Kurang
2002	6,44	Sangat Kurang
2003	11,69	Kurang
2004	11,39	Kurang
2005	10,43	Kurang
2006	9,17	Sangat Kurang
2007	8,78	Sangat Kurang
2008	12,15	Kurang
2009	11,43	Kurang
2010	13,11	Kurang
2011	16,18	Kurang
2012	15,87	Kurang
2013	15,25	Kurang
2014	15,25	Kurang
Rata-rata	12,30	Kurang

Sumber : BPS Provinsi Riau

Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa rasio DOF Kota Pekanbaru tahun 2000-2014 tergolong kurang, karena masih berada dalam interval 10,01-20,00%.

Hal ini berarti pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pemerintahannya dan pembangunan di daerahnya masih bergantung terhadap pemerintah pusat melalui penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

Dari pendekatan pengeluaran kemampuan keuangan daerah dapat dilihat melalui rasio indeks kemampuan rutin. Perhitungan rasio indeks kemampuan rutin daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014

Tahun	Rasio IKR (Persen)	Keterangan
2000	21,47	Kurang
2001	24,65	Kurang
2002	9,71	Sangat Kurang
2003	20,00	Sangat Kurang
2004	20,79	Kurang
2005	23,15	Kurang
2006	20,45	Kurang
2007	13,52	Sangat Kurang
2008	16,43	Sangat Kurang
2009	14,65	Sangat Kurang
2010	16,08	Sangat Kurang
2011	21,17	Kurang
2012	25,39	Kurang
2013	25,07	Kurang
2014	25,44	Kurang
Rata-Rata	19,87	Sangat Kurang

Sumber : BPS Provinsi Riau

Dari tabel 5 dapat dilihat dalam lima belas tahun rasio indeks kemampuan rutin Kota Pekanbaru masih dalam kategori yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 00,00% - 20,00% menurut tolak ukur yang dikemukakan wulandari yaitu sebesar 19,87% (rata-rata IKR).

Dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi

karena pendapatan daerah dari segi PAD sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai belanja rutin. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam membiayai pengeluaran belanja rutin saat ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah ini ditunjukkan dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti dana perimbangan.

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014

Tahun	Rasio Kemandirian (Persen)	Keterangan
2000	19,75	Instruktif
2001	14,55	Instruktif
2002	16,22	Instruktif
2003	15,51	Instruktif
2004	15,23	Instruktif
2005	14,68	Instruktif
2006	13,29	Instruktif
2007	12,58	Instruktif
2008	15,03	Instruktif
2009	14,91	Instruktif
2010	15,85	Instruktif
2011	19,77	Instruktif
2012	20,16	Instruktif
2013	22,65	Instruktif
2014	22,28	Instruktif
Rata-Rata	16,83	Instruktif

Sumber : BPS Provinsi Riau

Secara rata-rata dalam lima belas tahun terakhir kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru adalah sebesar 16,27% dan memiliki hubungan yang instruktif. Pola hubungan instruktif menandakan peranan pemerintah pusat lebih

dominan dari kemandirian pemerintah dari Kota Pekanbaru, atau dengan kata lain Kota Pekanbaru tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan daerah. Secara teoritis semakin besar rasio kemandirian keuangan daerah akan semakin besar pula kemampuan daerah tersebut mendanai kegiatan pemerintahan daerah dengan sumber-sumber yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Tetapi di sisi lain semakin besar bantuan yang diterima dari pemerintah pusat berarti semakin besar pula ketergantungan daerah terhadap penerimaan yang berasal dari luar daerah.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat dari pertumbuhan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan total pendapatan daerah, pertumbuhan belanja rutin, dan pertumbuhan belanja pembangunan.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru tahun 2000-2014 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 7
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014

Tahun	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan TPD	Pertumbuhan Belanja Rutin	Pertumbuhan Belanja Pembang
-------	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

	(%)	(%)	(%)	unan (%)
2000	-	-	-	-
2001	21,71	50,12	6,01	246,30
2002	210,13	491,21	687,54	99,04
2003	21,57	-33,02	-41,00	-21,06
2004	22,50	25,73	17,85	-1,00
2005	20,91	32,09	8,61	59,19
2006	20,15	36,57	36,03	85,11
2007	4,38	9,05	57,82	17,80
2008	35,62	-1,97	11,59	-45,26
2009	-8,80	-3,08	2,28	29,64
2010	17,77	2,65	7,31	-8,36
2011	61,12	30,60	22,39	14,69
2012	20,96	23,28	0,87	20,76
2013	18,90	23,74	20,39	64,84
2014	16,84	16,82	15,13	37,39
Rata - Rata	34,55	50,27	60,92	42,79

Sumber : BPS Provinsi Riau

Dalam lima belas tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan PAD adalah sebesar 34,55%, dan total pendapatan daerahnya sebesar 50,27%. Sementara dari segi belanja daerah, pertumbuhan belanja rutin selama lima belas tahun terakhir adalah 60,92% dan pertumbuhan belanja pembangunan adalah 42,79%. Dapat disimpulkan rasio pertumbuhan keuangan Kota Pekanbaru adalah negatif.

Rasio pertumbuhan yang negatif dikarenakan meskipun pengeluaran pemerintah untuk belanja pembangunan meningkat namun tidak diikuti oleh penurunan belanja rutin daerah. Pertumbuhan belanja pembangunan masih lebih kecil dibandingkan pertumbuhan belanja rutin pemerintah Kota Pekanbaru. Artinya pendapatan pemerintah Pekanbaru masih banyak dihabiskan untuk membiayai belanja operasional daerah dibandingkan dengan belanja untuk pembangunan.

4. Analisis Trend

a. Analisis trend untuk Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Analisis *trend* rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dilakukan untuk melihat kecenderungan perkembangan kemampuan keuangan daerah yang dinilai dari persentase pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya.

Persamaan estimasi untuk *Trend* derajat otonomi fiskal (DOF) dapat dilihat pada tabel berikut:

$$Y' = 13,673 - 1,094X + 0,089X^2$$

Tabel 8
Analisis trend untuk Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014

Tahun	DOF (Y)	X	Y'
2000	15,15	1	12,67
2001	12,28	2	11,84
2002	6,44	3	11,19
2003	11,69	4	10,72
2004	11,39	5	10,43
2005	10,43	6	10,31
2006	9,17	7	10,38
2007	8,78	8	10,62
2008	12,15	9	11,04
2009	11,43	10	11,63
2010	13,11	11	12,41
2011	16,18	12	13,36
2012	15,87	13	14,49
2013	15,25	14	15,80
2014	15,25	15	17,29

Sumber : BPS Provinsi Riau

Untuk melihat arah perkembangan *trend* rasio derajat otonomi fiskal Kota Pekanbaru enam tahun yang akan datang dapat diestimasi sebagai berikut:

Tabel 9
Estimasi Trend Rasio DOF Kota Pekanbaru Tahun 2015-2020

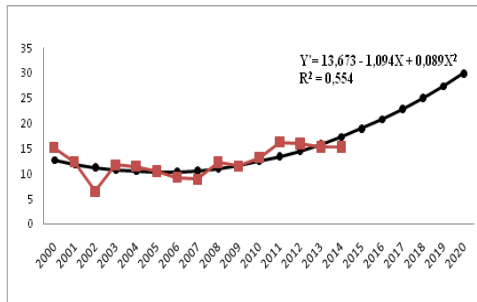
Tahun	X	Y'
2015	16	18,95
2015	17	20,80
2017	18	22,82
2018	19	25,02

2019	20	27,39
2020	21	29,95

Sumber : BPS Provinsi Riau

Jika digambarkan estimasi *Trend* rasio derajat otonomi fiskal Kota Pekanbaru dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar 1
Grafik Rasio dan Estimasi *Trend* Derajat Otonomi Fiskal Kota Pekanbaru Tahun 2000-2020



Sumber : Data Olahan, 2016

Dari gambar 1 diatas dapat kita lihat perkembangan rasio derajat otonomi fiskal sempat mengalami peningkatan dan penurunan. Rasio derajat otonomi fiskal terendah terjadi di tahun 2002. Hal ini disebabkan oleh besarnya peningkatan penerimaan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dibandingkan dengan penerimaan transfer tahun sebelumnya, sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerahnya yang dicerminkan dalam rasio derajat otonomi fiskal hanya tumbuh sebesar 6,44%.

Namun meskipun demikian dalam enam tahun yang akan datang kemampuan keuangan daerah yang dinilai berdasarkan rasio derajat otonomi fiskal diestimasikan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan kemampuan keuangan daerah ini terjadi karena semakin besarnya kontribusi PAD yang

diterima pemerintah daerah Kota Pekanbaru sehingga diharapkan kontribusi PAD dapat mengimbangi total pendapatan daerah Kota Pekanbaru. Sehingga diestimasikan rasio derajat otonomi fiskal mampu tumbuh hingga 29,95% di tahun 2020.

b. Analisis *Trend* untuk Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Persamaan estimasi untuk *Trend* indeks kemampuan rutin (IKR) dapat dilihat pada tabel berikut:

$$Y' = 24,031 - 1,980X + 0,141X^2$$

Tabel 10
Analisis *trend* untuk Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014

Tahun	IKR (Y)	X	Y'
2000	21,47	1	22,19
2001	24,65	2	20,64
2002	9,71	3	19,36
2003	20	4	18,37
2004	20,79	5	17,66
2005	23,15	6	17,23
2006	20,45	7	17,08
2007	13,52	8	17,22
2008	16,43	9	17,63
2009	14,65	10	18,33
2010	16,08	11	19,31
2011	21,17	12	20,58
2012	25,39	13	22,12
2013	25,07	14	23,95
2014	25,44	15	26,06

Sumber : BPS Provinsi Riau

Untuk melihat arah perkembangan *trend* rasio indeks kemampuan rutin Kota Pekanbaru enam tahun yang akan datang diestimasikan sebagai berikut:

Tabel 11

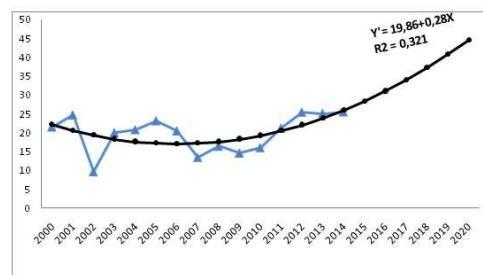
Estimasi Trend Rasio IKR Kota Pekanbaru Tahun 2015-2020

Tahun	X	Y'
2015	16	28,45
2016	17	31,12
2017	18	34,08
2018	19	37,31
2019	20	40,83
2020	21	44,63

Sumber : BPS Provinsi Riau

Jika digambarkan estimasi trend rasio indeks kemampuan rutin Kota Pekanbaru dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar 2
Grafik Rasio dan Estimasi Trend Indeks Kemampuan Rutin Kota Pekanbaru Tahun 2000-2020



Sumber : Data Olahan, 2016

Dari gambar 2 dapat dilihat kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari rasio IKR berfluktuasi setiap tahunnya. Kemampuan keuangan daerah terendah terjadi ditahun 2002 yang hanya tumbuh sebesar 9,71%. Tidak berbeda jauh dengan kemampuan yang digambarkan dalam rasio DOF, di tahun 2002 kemampuan pemerintah Kota Pekanbaru dalam membiayai belanja rutinnya juga sangat minim. Hal ini dikarenakan kontribusi PAD yang sangat kecil jika dibandingkan belanja rutin khususnya belanja pegawai dan belanja barang.

Sementara itu, trend kemampuan keuangan daerah yang

dinilai dari rasio indeks kemampuan rutin Kota Pekanbaru diestimasi dalam enam tahun yang akan datang tumbuh sangat pesat. Peningkatan rasio indeks kemampuan rutin ini disebabkan karena penerimaan PAD yang semakin meningkat dalam periode tahun 2010 hingga 2014. Meskipun belanja rutin Kota Pekanbaru juga turut mengalami peningkatan namun dalam lima tahun terakhir pertumbuhan PAD masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja rutin. Sehingga diestimasi dalam enam tahun yang akan datang PAD Kota Pekanbaru sudah dapat diandalkan untuk membiayai belanja rutin daerahnya.

c. Analisis Trend untuk Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persamaan estimasi untuk Trend rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

$$Y' = 20,961 - 2,376X + 0,215X^2 - 0,003X^3$$

Untuk lebih jelas perhitungan rasio kemandirian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 12
Analisis trend untuk Rasio Kemandirian Keuangan Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014

Tahun	KMD (Y)	X	Y'
2000	19,75	1	18,80
2001	14,55	2	17,05
2002	16,22	3	15,69
2003	15,51	4	14,71
2004	15,23	5	14,08
2005	14,68	6	13,80

2006	13,29	7	13,84
2007	12,58	8	14,18
2008	15,03	9	14,81
2009	14,91	10	15,70
2010	15,85	11	16,85
2011	19,77	12	18,23
2012	20,16	13	19,82
2013	22,65	14	21,61
2014	22,28	15	23,57

Sumber : BPS Provinsi Riau

Untuk melihat arah perkembangan *trend* rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru enam tahun yang akan datang dapat diestimasi seperti yang terlihat dari tabel berikut:

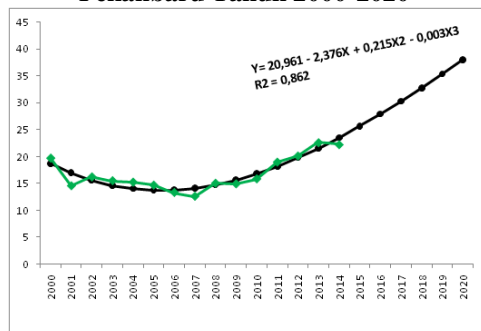
Tabel 13
Estimasi Trend Rasio Kemandirian Kota Pekanbaru Tahun 2015-2020

Tahun	X	Y'
2015	16	25,70
2016	17	27,97
2017	18	30,36
2018	19	32,86
2019	20	35,44
2020	21	38,10

Sumber : BPS Provinsi Riau

Jika digambarkan estimasi *trend* rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar 3
Grafik Rasio dan Estimasi Trend Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2000-2020



Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru cenderung stabil jika dibandingkan dengan rasio kemampuan keuangan daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari periode tahun 2009 hingga 2013. Sempat mengalami penurunan di tahun 2014. Namun penurunan ini tidak menjadikan kemandirian keuangan Pekanbaru menjadi lebih buruk. Jika diestimasi enam tahun yang akan datang, kemandirian keuangan Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan hingga 37,80% ditahun 2020. Semakin baiknya kinerja pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah Pekanbaru akan menyebabkan ketergantungan pemerintah Pekanbaru terhadap dana transfer pemerintah pusat semakin berkurang. Sehingga nantinya Pemerintah Pekanbaru dapat membiayai kegiatan pemerintah daerahnya sendiri tanpa menunggu dana transfer dari pemerintah pusat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam periode tahun 2000-2014 rata-rata rasio kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dalam rasio derajat otonomi fiskal (DOF) masih tergolong kurang. Keadaan ini menjelaskan rendahnya penerimaan PAD Kota Pekanbaru dibandingkan dengan

total penerimaan daerahnya. Sedangkan kemampuan daerah yang dilihat dari perspektif pengeluaran dicerminkan dari rata-rata nilai rasio indeks kemampuan rutin Kota Pekanbaru masih tergolong sangat kurang. Sementara dari segi kemandirian keuangan daerah, Kota Pekanbaru masih tergolong instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari kemandirian keuangan Kota Pekanbaru dengan kata lain Pekanbaru belum mandiri secara finansial. Jika dilihat dari rasio pertumbuhannya menunjukkan rata-rata negatif. Hal ini diakibatkan pertumbuhan nilai PAD, total pendapatan daerah dan belanja rutin tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunannya.

- 2) *Trend* Kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru di tahun 2015-2020 menunjukkan *trend* yang positif. Rasio kemampuan dan kemandirian keuangan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga masuk dalam kriteria selangkah lebih baik. Diproyeksikan untuk tahun 2015 hingga 2020 kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio derajat otonomi fiskal telah masuk dalam kategori sedang, sementara kemampuan keuangan berdasarkan indeks kemampuan rutin masuk dalam kategori cukup. Untuk rasio kemandirian telah masuk dalam kategori konsultatif, artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan daerah

dianggap sedikit lebih mampu mengelola keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kebijakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya agar kontribusi PAD terhadap APBD semakin berimbang.
- 2) Masyarakat Kota Pekanbaru harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan pemerintah sangat diperlukan, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Peran aktif masyarakat tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya PAD yang diterima daerah tetapi juga membantu pemerintah membiayai sendiri pembangunan daerah Kota Pekanbaru dengan tidak bergantung terhadap dana perimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Oesi. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ekonomi*, 1-10.

- Badan Pusat Statistik, 2016.
- Basri, Syafril. 2007. Optimalisasi penerimaan daerah didalam peningkatan kemampuan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. 1-8.
- Dama, R. M. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara. 1-36.
- Dwiranda, A. 2008. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. 6-7.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Haryanto, A. 2014. Analisis Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan . *Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1-56. Amiruddin, Idris. (2016). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: deepublish.
- Mahardika, I. G., & Artini, L. G. 2012. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 741.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, N. A., & dkk. 2014, Oktober. Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Manado dan Bitung Tahun 2008-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 14 No.3*, hal. 56-70.
- Savitry, E. 2013. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar. 16-56.
- Sijabat, M., & dkk. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.2 No.2*, 236-242.
- Sularso, H., & Resitianto, Y. E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, 1 (2)*, 113.
- Wulandari, A. 2001, November. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik Vol 5 No.2*.
- Widjaja. 2009. *Otonomi Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Press.